

BAB V

PENUTUP

Pada Bab IV telah dilakukan analisa terhadap data-data yang dipaparkan dalam Bab II dan III dengan menggunakan kerangka pemikiran yang dirumuskan dalam Bab I. Analisa tersebut dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana upaya manajemen konflik yang dilakukan Pemerintah Omar Hasan Bashir terhadap konflik Darfur di Sudan Barat.

Pemaparan yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam konteks penelitian terhadap konflik Darfur di kawasan Sudan Barat ini dibutuhkan pemahaman lebih mengenai Politik dan Pemerintahan Timur Tengah, di mana dalam mengelola konfliknya dibutuhkan adanya Resolusi Konflik. Cabang resolusi konflik yang dipakai dalam penelitian ini adalah manajemen konflik. Terlebih apabila upaya manajemen konflik tersebut dilakukan oleh seorang kepala negara maka arah manajemen konfliknya dilakukan secara langsung. Dengan menggunakan teori manajemen konflik secara langsung pemerintah Bashir dalam menggunakan beberapa pendekatan manajemen konflik yang berbeda pada tiap tahap konflik. Selain itu strategi manajemen konflik yang dilakukan juga berbeda pula pada tiap tahapannya. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi konflik saat itu.

Konflik yang berawal dari pertikaian antar etnis Afrika Hitam dan Afrika Arab di Darfur karena perebutan sumber daya alam, berkembang menjadi pemberontakan kelompok minoritas melawan Pemerintah Sudan sejak 2003

Kelompok Pemberontak Darfur menuduh Pemerintah Sudan telah menelantarkan pembangunan di Darfur. Dominasi etnis Afrika Arab dalam hampir semua aspek kehidupan masyarakat Darfur membuat Pemberontak Darfur menuntut kesetaraan baik dalam pemerintahan, politik, ekonomi maupun sosial. Konflik etnis tersebut telah memakan banyak korban sehingga menimbulkan tuduhan dari masyarakat internasional bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dan genosida yang dilakukan oleh Pemerintah Sudan.

Menyikapi kondisi Darfur yang mengalami fluktuasi maka cara penanganan konflik juga berbeda. Maka dalam mengelola konflik tersebut pemerintah Bashir membaginya dalam dua tingkatan yaitu pada tingkat nasional dan tingkat internasional. Pada tingkat nasional pemerintah pada awal konflik menggunakan strategi *power coercive* dengan memanfaatkan milisi bersenjata Janjaweed, kemudian ketika konflik mulai menurun pemerintah bersama dengan kelompok pemberontak mulai melakukan kompromi dengan merumuskan upaya damai melalui perundingan. Selain mengupayakan perdamaian antara pemerintah dengan pemberontak Darfur, pemerintah Sudan juga ikut memfasilitasi upaya persetujuan damai antar etnis yang berselisih di kawasan Darfur.

Sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah Bashir di tingkat internasional, pertama dengan mengikutsertakan pihak ketiga (*joint problem solving*) yaitu Uni Afrika sebagai organisasi sekawasan dalam merumuskan perundingan damai agar tercipta perdamaian antara pihak pemberontak Darfur dan pemerintah Sudan. Dengan berperan sertanya Uni Afrika dalam pusaran konflik

Darfur telah berhasil tercapai *Darfur Peace Agreement* meskipun akhirnya

keepakatan tersebut gagal karena terjadinya perpecahan dalam pihak kelompok pemberontak Darfur. Kedua, meminimalisir adanya intervensi asing atas konflik Darfur baik dengan strategi *self-help* maupun penolakan.

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terlebih dalam konteks wilayah Afrika yang masih cukup jarang dikaji. Negara-negara di Afrika yang umumnya dikenal sebagai negara terbelakang, menyimpan beragam konflik internal maupun eksternal yang harus menjadi perhatian kita. Munculnya konflik etnis di Sudan memberikan gambaran secara jelas bagaimana situasi suatu negara yang mengalami perpecahan internal yang pada akhirnya mengganggu kestabilan politik dan keamanan nasional. Seperti apapun konflik yang terjadi hanya akan memakan korban jiwa dan menyebabkan masalah kemanusiaan. Banyaknya korban yang telah berjatuhan akibat perang di Darfur harus diatasi dengan lebih serius demi menekan korban dan menghentikan pelanggaran-pelanggarann HAM yang telah terjadi serta demi